

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian mengenai struktur corporate governance terhadap manajemen laba telah banyak dibahas

1. Nasution dan Setiawan (2007) menguji mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan di Indonesia. Sampel diambil dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2000-2004. Manajemen laba diproksikan oleh akrual kelolaan yang dideteksi dengan model akrual khusus Beaver dan Engel (1996) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan keberadaan komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah variabel dependen yang digunakan sama yaitu dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan hanya saja pada penelitian sekarang ditambahkan dengan dewan direksi, reputasi KAP.

Perbedaan dari penelitian ini dengan sekarang adalah sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan sedangkan pada penelitian sekarang di perusahaan manufaktur.

2. Ujijantho dan Bambang (2007) meneliti mengenai mekanisme *corporate governance*, manajemen laba, dan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2002-2004. Hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dan manajemen laba itu sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah menggunakan variabel dewan komisaris dan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang periode pada perusahaan yang digunakan pada perusahaan ini periode 2002-2004 sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode 2008-2011.

3. Chen et al. (2005) meneliti *corporate governance* dengan menggunakan alat regresi berganda dan menggunakan variabel independen kualitas audit, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran auditor dan spesialisasi industri auditor, serta ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan *leverage* berhubungan negatif terhadap manajemen laba.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang alat uji yang digunakan menggunakan uji regresi berganda variabel yang digunakan dewan komisaris

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang, penelitian ini menggunakan kualitas audit, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan sedangkan pada penelitian sekarang variabel yang digunakan dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, reputasi KAP dan ukuran perusahaan.

4. Winanda (2009) meneliti analisis pengaruh penerapan *good corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan, variabel independen yang digunakan adalah *corporate governance*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja perusahaan, menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berhubungan positif terhadap kinerja perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang, Variabel dependennya yang digunakan adalah kinerja perusahaan sedangkan independennya *corporate governance*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 Teori Keagenan

Dalam memahami *corporate governance* dapat digunakan perspektif keagenan sebagai dasar pemikiran. Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujijanto dan Bambang (2007) menyatakan bahwa suatu hubungan antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*) disebut hubungan keagenan. Adanya perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan konflik antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*) memicu timbulnya biaya keagenan (*agency cost*).Widowati

(2009) menjelaskan bahwa teori keagenan yang berkaitan dengan *corporate governance* dapat dijadikan alat manajer (*agent*) untuk meyakinkan investor (*principal*) dalam memastikan penerimaan return atas dana yang telah mereka investasikan. Pada dasarnya *agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda, oleh karena itu akan menimbulkan konflik yang potensial. Konflik kepentingan tersebut terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Winanda, 2009). Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggotadi perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. *Principal* merupakan pemegang saham atau investor, sedangkan *agent* merupakan manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen.

Kepentingan ini terus meningkat karena pihak *principal* tidak dapat memonitor aktivitas *agent* sehari-hari untuk memastikan bahwa agent bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Sebaliknya, *agent* sendiri memiliki lebih banyak informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi antara *principal* dan *agent*. Kondisi ini dinamakan dengan asimetri informasi. Adanya asimetri informasi tersebut dapat mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal

untuk memaksimalkan keuntungan bagi agen. Agen dapat termotivasi untuk melaporkan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen (Ujiantho, 2007).

Menurut Mackfudz (2003) dalam Sam'ani (2008) dewan direksi merupakan pusat pengendali dalam perusahaan, dan dewan direksi juga merupakan penanggung jawab utama pada keberhasilan perusahaan secara jangka panjang. Terkait dalam teori agensi fungsi dewan direksi berpengaruh dalam proses pengaturan kinerja perusahaan sehingga dewan direksi mengetahui seluruh informasi baik dan buruknya yang ada dalam perusahaan. Informasi tersebut disebut asimetri informasi dimana terdapat informasi yang sangat berharga di dalamnya yang apabila tidak digunakan dengan baik akan merugikan perusahaan, informasi tersebut biasanya telah diketahui atau di dapat terlebih dahulu oleh para dewan direksi untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Dengan demikian terciptalah suatu regulasi yang disebut *Corporate Governance* yang berfungsi untuk mencegah tindakan dewan direksi yang menyimpang dari pelaksanaan kegiatan perusahaan dan diharapkan tidak terjadi manajemen laba sehingga perlu dilakukan kontrol yang ketat.

Menurut Zehnder (2000) dewan komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance*, dewan komisaris bertugas untuk memonitor dewan direksi terkait dengan pelaksanaan utama dewan direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dewan komisaris bertindak untuk menyelaraskan pendapat agar tidak terjadi perselisihan antar manajer dan tentunya mengontrol pelaporan keuangan dan dipastikan tidak ada monopoli sehingga tidak menimbulkan manajemen laba.

Menurut Januarti (2007) investor cenderung memakai data yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi oleh karena itu dalam pelaporan keuangan harus benar-benar riil dari hasil audit dan tidak ada rekayasa dari manapun termasuk dari auditor itu sendiri. Auditor disini diharapkan agar tidak terjadi manipulasi data dalam pelaporan keuangan sehingga laporan yang dihasilkan adalah benar-benar asli audit dari auditor tersebut.

Menurut Sam'ani (2008) komite audit bertugas mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal. Dengan komite audit ini diharapkan agar laporan keuangan dapat meyakinkan investor supaya mereka tidak mencabut investasinya, selain itu komite audit juga merupakan penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dalam masalah pengendalian. Menurut Ningsaptiti (2010) ukuran perusahaan merupakan besar-kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai alat ukur besar-kecilnya perusahaan, sehingga manajemen laba dapat dilihat dari besar kecilnya suatu perusahaan.

2.2.2 Manajemen Laba

A. Definisi Manajemen Laba

Manajemen laba akhir-akhir ini merupakan sebuah fenomena umum yang terjadi di sejumlah perusahaan. Praktik yang dilakukan untuk mempengaruhi angka laba dapat terjadi secara legal maupun tidak legal. Praktik legal dalam manajemen laba berarti usaha mempengaruhi laba tidak bertentangan dengan aturan pelaporan keuangan dalam Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) khususnya dalam Standar Akuntansinya yaitu dengan cara memanfaatkan peluang

untuk membuat estimasi akuntansi, sedangkan manajemen laba yang dilakukan secara tidak legal dilakukan dengan cara melaporkan transaksi-transaksi pendapatan atau biaya secara fiktif dengan menambah (*mark up*) atau mengurangi (*mark down*) nilai transaksi, sehingga menghasilkan laba pada nilai/tingkat tertentu yang dikehendaki.

Menurut Sugiri (1998) dalam Widyaningdyah (2001) membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu:

1. Definisi sempit

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk bermain dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan besarnya laba.

2. Definisi luas

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha. Dimana manajer bertanggungjawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.

Pengertian manajemen laba oleh Scott (2000) adalah sebagai pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer. Terdapat dua cara untuk memahami manajemen laba yaitu, Pertama, sebagai perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak

utang dan biaya politik. Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif kontrak efisien, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Persoalan manajemen laba sebenarnya bukan hal yang baru dalam praktik pelaporan keuangan (*financial reporting*) pada suatu entitas bisnis. Hal ini disebabkan karena perusahaan kurang memenuhi target dari yang diperkirakan oleh pasar. Tekanan untuk membuat keuntungan manajemen melakukan manajemen laba dengan cara mempengaruhi angka laba yang mengakibatkan penurunan kualitas laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (Widarto, 2004). Penurunan kualitas laporan keuangan merupakan dampak utama yang diakibatkan dari adanya manajemen laba, di samping dampak-dampak lainnya. Menurut Setiawati dan Na'im (2000) manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan dan dapat menimbulkan bias sehingga dapat mengganggu pemakai laporan keuangan atas angka-angka yang disajikannya.

B. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Manajemen Laba

Ada tiga faktor penyebab terjadinya praktik manajemen laba (Gumanti, 2000), yaitu :

1. Manajemen akrual

Manajemen laba biasanya dikaitkan dengan semua aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer

2. Penerapan suatu kebijakan akuntansi yang wajib

Manajemen laba berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan, yaitu antara menerapkannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijaksanaan tersebut.

3. Perubahan akuntansi secara sukarela

Manajemen laba berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau mengubah suatu metode akuntansi tertentu di antara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada.

C. Faktor-faktor Pendorong Manajemen Laba

Dalam posotif accounting theory terdapat tiga hipotesis yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986), yaitu :

1. Hipotesis Rencana Bonus

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan *earnings* lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan dalam suatu perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, maka seorang manjer perusahaan akan melakukan penaikan laba saat ini yakni dengan memilih metode akuntansi yang mampu menggeser laba dari masa depan ke masa kini. Tindakan ini dilakukan dikarenakan manajer termotivasi untuk mendapatkan insentif yang lebih tinggi untuk masa kini.

2. Hipotesis Rencana Utang

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal.

Dalam suatu perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* cukup tinggi, maka akan mendorong manajer perusahaan untuk cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba.

3. Hipotesis biaya politik

Dalam suatu perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, akan mendorong manajer untuk memilih metode akuntansi yang menanggukkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Adanya biaya politik di karenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen. Teori keagenan terdapat asumsi bahwa setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga akan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, sedangkan pemegang saham sebagai pihak *principal* tentu akan mengadakan kontrak dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri yakni supaya profitabilitas yang selalu meningkat.

Faktor-faktor yang mendorong manajer melakukan praktek manajemen laba (Abdelghany, 2005) adalah :

1. Memenuhi Harapan Analisis

Secara umum ekspektasi analisis dan prediksi perusahaan cenderung kearah dua komponen dari kinerja keuangan yaitu pendapatan dan laba

dari operasi. Tekanan untuk memenuhi harapan laba sangat besar dan dapat menjadi katalisator utama dalam memimpin manajer untuk terlibat dalam praktek manajemen laba.

2. Menghindari Pelanggaran Perjanjian Hutang dan Meminimalakan Biaya Politik.

Beberapa perusahaan memiliki insentif untuk menghindari pelanggaran persyaratan laba terhadap basis utang. Jika dilanggar, pemberi pinjaman unguin dapat melakukan suku bunga utang atau permintaan pembayaran segera. Akibatnya beberapa perusahaan dapat menggunakan teknik manajemen laba dalam meningkatkan laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian tersebut.

3. Rekeyasa Laba Menuju Tren Masa Depan yang Berkelanjutan

Selama bertahun-tahun telah dipercaya bahwa perusahaan harus berusaha untuk mengurangi volatilitas arus pendapatan dalam rangka untuk memaksimalkan harga saham demi menghindari resiko. Akibatnya, perusahaan memiliki insentif untuk mengelola laba untk membantu mencapai aliran laba yang berkelanjutan.

4. Memenuhi Rencana Persyaratan Bonus

Laba yang dikelola konsisten searah dengan pemberian bonus bagi manajer perusahaan. Jika laba berada dibawah level minimum untuk mendapatkan bonus, maka laba akan dikelola diatas level minimum tercapai dan bonus diterima. Sebaiknya, jika laba berada diatas level maksimum untuk mendapatkan bonus, maka laba akan dikelola dibawah

level maksimum. Penghasilan tambahan yang tidak menambah bonus dalam periode ini disimpan untuk sewaktu-waktu mendapatkan bonus di periode mendatang.

5. Pergantian manajemen

Manajemen laba biasanya terjadi sekitar waktu pergantian manajemen, CEO (*Chief Executive Officer*) sebuah perusahaan dengan indikator kinerja yang buruk akan mencoba untuk meningkatkan laba yang dilaporkan untuk mencegah atau menunda dipecat. Disisi lain, CEO baru akan mencoba mengelola laba yang baik di waktu yang mendatang dengan praktek manajemen laba, sehingga ketika kinerjanya dievaluasi dan diukur dapat menyalahkan laba yang dihasilkan rendah oleh kinerja CEO sebelumnya.

D. Praktek Manajemen Laba

Praktek manajemen laba yang sering dilakukan perusahaan menurut (Abdelghany.2005) yaitu ;

1. *Big Bath*

Dalam hal ini pengakuan terhadap biaya dilakukan *one time restructuring charge*. Dimana hal ini perusahaan akan mengalami pembebanan biaya secara besar-besaran pada tahun ini dan dampaknya pada tahun berikutnya perusahaan akan mengalami profit yang besar.

2. *Abuse of Materiality*

Dalam hal ini adanya penyalahgunaan prinsip materialitas dalam penyusunan laporan keuangan. Dimana prinsip ini memiliki interpretasi

yang luas, fleksibel dan tidak memilih jangkauan spesifik untuk menentukan tempat penyimpanan item yang bersifat material atau tidak.

3. *Cookie Jar*

Dalam hal ini jika kondisi keuangan perusahaan sedang membaik, perusahaan dapat mengurangi *earnings* dengan melakukan pencadangan yang lebih banyak bila kondisi keuangan sedang memburuk, maka perusahaan dapat menambah *earnings* dengan mengembalikan akrual dan pencadangan untuk mengurangi periode beban berjalan.

4. *Round Tripping, Back to Back and Swap*

Dalam hal ini perusahaan bekerjasama dengan perusahaan lain dengan menjual suatu aset atau unit usaha ke perusahaan lain dengan perjanjian untuk membelinya kembali sewaktu-waktu dengan harga tertentu. dimana hal ini akan memberikan dampak pada peningkatan pemasukan perusahaan.

5. Periode Waktu Adopsi Standar Akuntansi yang Diwajibkan

FASB (*Financial Accounting Standard Board*) dalam mewajibkan standar baru bagi perusahaan, biasanya perusahaan dianjurkan untuk menerapkan lebih dini dengan diberikan masa transisi dua sampai tiga tahun sebelum adopsi wajib dilakukan. Dalam masa transisi, perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan dengan mengadopsi lebih dulu atau tidak standar baru yang telah ditetapkan dengan cara memilih tahun adopsi yang paling menguntungkan bagi gambaran keuangan perusahaan.

6. Perubahan Akuntansi Secara Sukarela dan Akuntansi Konservatif

Dalam hal ini perusahaan beralih dari suatu metode ke metode akuntansi yang berlaku umum lainnya. Hal ini dikarenakan sikap kehati-hatian dalam mengakui pendapatan. Ketika perusahaan mengalami peningkatan investasi, amaka laba yang dilaporkan lebih rendah, dengan pengakuan pendapatan yang lebih rendah melalui pencadangan yang lebih tinggi sehingga memberikan fleksibilitas perusahaan melaporkan lebih banyak pendapatan dimasa yang akan datang.

7. Menggunaka Derivatif

Dalam hal ini perusahaan dapat memanipulasi laba dengan membeli *hedging* (misalnya *put option*) untuk jangka waktu tertentu untuk beralih keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari laporan laba komprehensif ke laporan laba rugi. Dengan demikian, perusahaan dapat sewaktu-waktu menjual atau membeli *put option* untuk menambha atau menutupi laba atau kerugian perusahaan.

2.2.3 Corporate Governance

A. Definisi *Corporate Governance*

Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Kalangan pebisnis mendefinisikan *corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan. *Corporate governance* diartikan pula

sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Sam'ani, 2008).Setiawan (2007) menjelaskan manfaat dari *corporate governance* adalah entitas bisnis efisien, meningkatkan kepercayaan publik, menjaga going concern perusahaan, mengukur kinerja target manajemen, meningkatkan produktivitas, mengurangi distorsi. Manfaat lain dari *corporate governance* adalah meningkatkan modal, rendahnya biaya modal, meningkatkan kinerja bisnis dan ekonomi serta memberikan pengaruh positif terhadap saham (FCGI publication, 2006).

Beberapa konsep tentang *corporate governance* antara lain berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan (Vishny, 1997). Iskandar dkk (1999) dalam Sam'ani (2008) menyatakan bahwa *corporate governance* merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan *stakeholders* untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh return.

B. Mekanisme *Corporate Governance*

Menurut Wals dan Seward dalam Gunarsih (2003) terdapat dua jenis mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham (*shareholder*) yaitu mekanisme pengendalian perusahaan internal dan mekanisme pengendalian berdasarkan pasar. Pengendalian internal didesain untuk menyamakan kepentingan antara manajer dan pemegang saham.

Menurut Riyanto (2005) secara umum *corporate governance* menyangkut sarana, mekanisme yang berperan sebagai cek atau *self-serving behavior*. *Good corporate governance* bisa diartikan sebagai interaksi antar struktur dan mekanisme yang menjamin adanya kontrol dan *accountability*, namun tetap mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Faktor utama yang mendorong terciptanya *affective governance* adalah *internal auditors*, *board of directors*, *senior management*, dan *external auditor*.

C. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Secara umum, penerapan *corporate governance* secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan kepuasan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri stakeholder terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Dari berbagai tujuan tersebut pemenuhan kepentingan seluruh stakeholder secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan, merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Prinsip-prinsip dari *corporate governance* yang menjadi indikator, sebagaimana dijelaskan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), adalah :

1. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan dan kesalahan perilaku insider. Dalam melaksanakan kegiatan pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan keselarasan.

2. *Transparancy* (Transparansi)

Transparansi adalah pengungkapan suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalakan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang materiil dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan system pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian

terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility (Responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini mewujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menunjang etika dan memelihara bisnis yang kuat.

5. *Independensi* (Independen)

Untuk melancarkan asas *Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak salingmendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antar komposisi komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus objektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

Prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, responsibilitas dan independen *corporate governance* dalam mengurus perusahaan,

sebaiknya diimbangi dengan *Good faith* (bertindak atas itikad baik) dan kode etik perusahaan serta pedoman *corporate governance*, agar visi dan misi perusahaan dapat terwujud. Pedoman *corporate governance* yang telah dibuat oleh komite nasional *corporate governance* hendaknya dijadikan kode etik perusahaan yang dapat memberikan acuan pada pelaku usaha untuk melaksanakan *corporate governance* secara konsisten dan konsekuen. Hal ini penting karena mengingat kecenderungan aktifitas usaha yang semakin mengglobal dan dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja yang lebih baik.

D. Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance*

Esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap shareholder dan pemakai kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Tri Gunarsih, 2003). Disamping hal tersebut *corporate governance* juga mempunyai manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *Corporate Value*.
3. mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

4. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.
5. mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sedangkan tujuan *corporate governance* dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholder non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. *Meningkatkan* efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

2.2.4 Dewan Direksi

Dengan adanya pemisahan peran antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajer sebagai agennya, maka manajer pada akhirnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam hal pengalokasian dana investor (Jensen & Meckling, 1997). Menurut Mackfudz (2003) Dewan direksi memiliki peran penting dalam perusahaan yaitu untuk menentukan arah dan kebijakan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Variabel ukuran dewan direksi dihitung dengan jumlah seluruh anggota dewan direksi.

2.2.5 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris memiliki peran untuk memonitor kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang muncul antara dewan direksi dan pemegang saham, sehingga kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah di rencanakan. Dewan komisaris memegang peran penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian perusahaan. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Zehnder, 2000). Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar terciptanya perusahaan yang *good corporate governance*. Pengukuran komisaris independen dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris.

2.2.6 Reputasi KAP

Investor akan lebih cenderung untuk memakai data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi (Januarti, 2007). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 16 disebutkan bahwa KAP (Kantor Akuntan Publik) dapat berbentuk :

- a. Perseorangan: KAP yang berbentuk badan usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang Akuntan Publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin.
- b. Persekutuan: KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan hanya dapat didirikan paling sedikit 2 orang Akuntan Publik, dimana masing-masing sekutu merupakan rekan dan seorang sekutu bertindak sebagai Pimpinan Rekan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan KAP/auditor yang bereputasi adalah KAP/auditor yang termasuk Big 4, sehingga perusahaan tidak akan mengganti dalam kelompok Big 4 Auditors yaitu:

1. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Hans Tuanakotta Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan; Osman Bing Satrio & Rekan.
2. Ernst & Young (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko & Sandjaja; Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.
3. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan Siddharta & Widjaja.
4. Price water house Cooper (PwC) yang berafiliasi dengan Haryanto Sahari & Rekan; Tanudiredja, Wibisena & Rekan.

Dalam pengukuran perusahaan audit menggunakan variabel *dummy* dengan nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh BIG 4 dan 0 jika lainnya.

2.2.7 Komite Audit

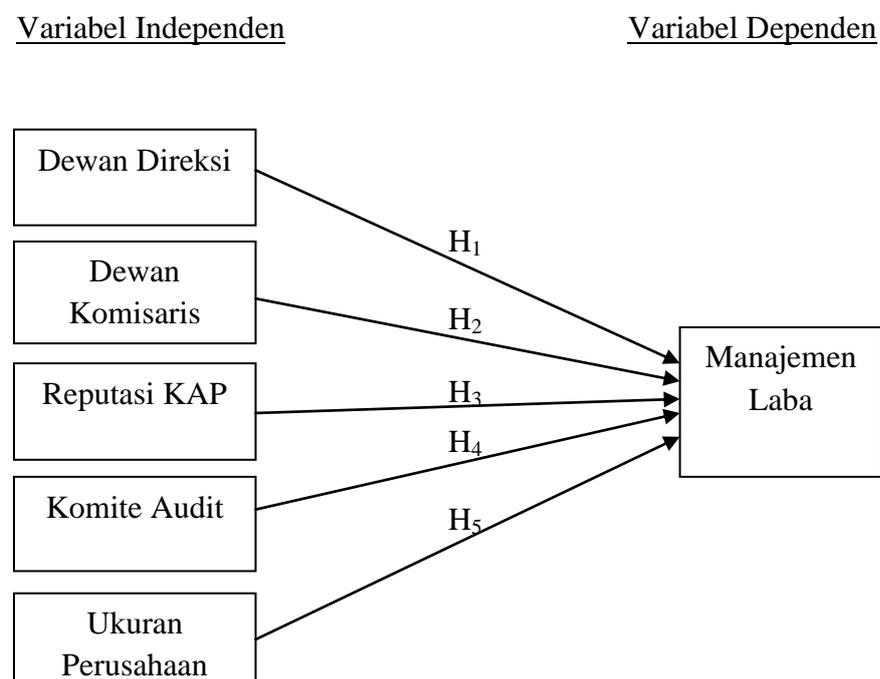
Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal (Sam'ani, 2008). Menurut Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan, selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

2.2.8 Ukuran perusahaan

Mengetahui besar kecilnya perusahaan terdapat pada beberapa proksi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran perusahaan antara lain jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Ningsaptiti (2010) semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanams, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula dikenal dalam masyarakat. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma dari total asset.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya serta kuat lemahnya hubungan antara variabel dependen berupa manajemen laba dengan variabel independen ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, reputasi KAP, komite audit, ukuran perusahaan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Dari gambar kerangka pemikiran diatas dapat dikemukakan faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba. Dilihat dari variabel dewan direksi, dewan komisaris, reputasi KAP, komite audit, dan ukuran perusahaan merupakan variabel independen sedangkan manajemen laba merupakan variabel dependen.

2.4 HIPOTESIS PENELITIAN

2.4.1 Dewan Direksi dan Manajemen Laba

Di dalam sebuah perusahaan, dewan direksi memiliki peran penting yaitu untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh perusahaan baik itu dalam jangka pendek maupun panjang. Piefier & Salancik (1978) dalam Wardhani (2008) menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi pula. Sedangkan menurut (Yermack, 1996) kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal, yaitu meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi dari pemisahan antara manajemen dan kontrol.

Pengungkapan tersebut dapat dikatakan apabila jumlah dewan direksi di dalam suatu perusahaan banyak, maka yang terjadi adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan pihak manajemen sehingga menyebabkan *corporate governance* yang buruk, dan hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan yang berakibat manajemen laba akan semakin meningkat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 = Dewan direksi memiliki pengaruh terhadap manajemen laba

2.4.2 Dewan Komisaris Independen dan Manajemen Laba

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Menurut Egon Zehnder (2000) dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Terkait dengan manajemen laba, dewan komisaris independen tidak berkaitan langsung dengan perusahaan yang mereka tangani karena bertugas untuk memonitoring direksi perusahaan tanpa ada tekanan dari pihak manapun sehingga, pekerjaan yang dilakukannya murni tanpa ada campur tangan dengan pihak manajemen.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dirumuskan hoipotesis sebagai berikut :

H2 = Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap manajemen laba

2.4.3 Reputasi KAP dan Manajemen Laba

Sinarwati (2010) dalam Rahmawati (2011) menjelaskan bahwa berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu *self interest*, maka kehadiran pihak ketiga sebagai mediator hubungan keagenan diperlukan dalam hal ini adalah auditor independen.

Investor sebagai pihak eksternal melihat informasi akuntansi yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan cenderung lebih mempercayai yang dihasilkan oleh auditor yang memiliki reputasi baik KAP/auditor yang bereputasi

dalam penelitian ini adalah yang masuk dalam Big 4 menurut Sinarwati (2010) dalam Rahmawati (2011) bahwa “perusahaan tidak akan mengganti KAP jika KAPnya sudah bereputasi “ karena dengan KAP yang bereputasi maka tindakan manajemen laba dapat dikendalikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 = Reputasi KAP memiliki pengaruh terhadap manajemen laba

2.4.4 Komite Audit dan Manajemen Laba

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan pegawai internal, dan sistem pelaporan keuangan. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite ini merupakan komisaris independen sekaligus ketua komite. Anggota lainnya yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal independen.

Carcello *et.al* (2006) menyelidiki hubungan antara keahlian komite audit di bidang keuangan dan manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan komite audit di bidang keuangan terbukti efektif mengurangi manajemen laba. Adanya komite audit di perusahaan diharapkan agar pengawasan

terhadap perusahaan dapat meningkat sehingga tercipta praktik perusahaan yang transparan guna meminimalisir manajemen laba pada perusahaan

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 = Komite audit memiliki pengaruh terhadap manajemen laba

2.4.5 Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Sudarmadji dan Sularto,2007)

Veronica dan Utama (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah variabel yang berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba. Semakin besar ukuran perusahaan. Maka semakin kecil tindak manajemen labanya. Dengan ini disimpulkan bahwa manajer yang memimpin perusahaan besar memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer perusahaan kecil

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 = Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba